

PEMBINAAN KOPERASI DI KOTA PEKANBARU

Oleh :

Siti Fatimah (1401112154)

Sifahkadir@gmail.com

pembimbing: Zaili Rusli

Jurusan Ilmu Administrasi - Program Studi Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. HR. Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293

Telp/Fax 0761-63272

Abstract

Cooperative is a form of business activities together with the community that can meet the needs of economic and social together. Where in accordance with the meaning of the Cooperative itself contained in Law no. 17 of 2012 on Cooperatives which states that: Cooperatives are legal entities established by individuals or legal entities cooperatives, with the separation of the wealth of its members as capital to run the business, which fulfills the shared aspirations and needs in the economic, social and cultural fields in accordance with the values and principles of the Cooperative. This study aims to determine the Coaching of Cooperative Development by the Department of Cooperatives Small and Medium Enterprises Pekanbaru City and to know the constraints in the Coaching of Cooperative Development Small and Medium Enterprises Pekanbaru City. This research uses descriptive qualitative approach. Informant research Head of Cooperatives, Head of Sub Division Personnel, General, and Equipment. Data collection techniques by interview, observation, and documentation. Data obtained will be analyzed by qualitative descriptive method. Based on the results of research known that the implementation of co-operative development by the Office of Cooperative Enterprises, Micro, Small and Medium City Pekanbaru already coaching but not optimal and yet can be said good because the cooperative has a goal to achieve the desired goal to improve the welfare of society as a whole through the institutional Cooperative. There are two factors that become obstacles in the coaching of cooperation by the Office of Cooperatives Micro Small and Medium Enterprises Pekanbaru city that is internal factors such as limited facilities and infrastructure, limited funds for coaching program, lack of accurate data of cooperatives, limited human resources (HR) coach cooperative, and from external factors namely: lack of capital Cooperatives, limited human resources, and Cooperative business is not run professionally.

Keywords: Coaching, Cooperative. Pekanbaru City.

Latar Belakang

Pembangunan Nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan berdasarkan kemampuan Nasional dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tahap perkembangan yang makin pesat dan mengglobal. Sebagai salah satu bangsa yang sedang berkembang, bangsa Indonesia sedang giat-giatnya mengejar ketertinggalannya di segala bidang. Salah satu upaya untuk mengejar ketertinggalannya yaitu salah satunya dengan melakukan pembangunan di bidang ekonomi dan industri. Dalam rangka menghadapi era globalisasi yang mengandalkan kemajuan industri, yang tujuan utamanya mewujudkan struktur ekonomi yang seimbang menuju masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Berkembangnya tingkat perekonomian, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat tidak terlepas dari peran serta suatu badan usaha. Badan usaha yang tidak sehat atau bekerja kurang baik, kurang mampu memberikan kontribusi dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan. Sebaliknya, Badan usaha yang sehat dan bekerja secara maksimal tentu dapat meningkatkan perekonomian dan mampu mewujudkan kesejahteraan tersebut. Badan Usaha yang di maksudkan dapat berupa suatu Badan Usaha formal pemerintahan atau badan usaha bersama kemasyarakatan.

Koperasi merupakan suatu bentuk dari kegiatan Badan Usaha bersama kemasyarakatan yang dapat memenuhi kebutuhan bersama di bidang ekonomi dan sosial. Dimana sesuai dengan pengertian Koperasi itu sendiri yang terdapat dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian yang mengatakan bahwa: Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau

badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.

Koperasi hendaknya dapat menjadi alat untuk membangun ekonomi Nasional, dan Koperasi mampu membawa kemakmuran serta kesejahteraan tidak hanya untuk satu dua orang atau satu golongan saja, akan tetapi kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia sesuai dengan tujuan Koperasi dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian yang berbunyi “Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian Nasional yang demokratis dan berkeadilan”.

Koperasi merupakan bentuk perusahaan organisasi dimana tujuan utamanya bukan mencari keuntungan tetapi mencari kesejahteraan dari anggotanya. Koperasi sebagai perkumpulan untuk kesejahteraan bersama, melakukan usaha dan kegiatan di bidang pemenuhan kebutuhan bersama dari pada anggotanya. Koperasi mempunyai peranan yang cukup besar dalam menyusun usaha bersama dari orang-orang yang mempunyai kemampuan ekonomi terbatas. Dalam rangka usaha untuk memajukan kedudukan rakyat yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas tersebut, maka pemerintah Pekanbaru memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan perkumpulan-perkumpulan Koperasi.

Pembinaan adalah suatu proses belajar dengan melepaskan hal-hal yang sudah dimiliki dan dipelajari hal-hal baru yang belum dimiliki, dengan tujuan membantu sasaran dalam menjalaninya, untuk memperbaiki dan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang telah dimiliki atau yang telah ada sebelumnya untuk mencapai hasil kerja dan kehidupan,

yang telah dijalaninya menjadi jauh lebih baik, lebih efektif, dan lebih efisien.

Pembinaan Koperasi sangat penting dalam upaya memupuk pertumbuhan dan sekaligus meningkatkan peranan dan tanggung jawab masyarakat golongan ekonomi lemah dalam kegiatan pembangunan. Dalam melaksanakan pembinaan Koperasi, yang diutamakan adalah Koperasi-koperasi primer. Koperasi primer dapat mengantarkan masyarakat desa menuju kemajuan dan kesejahteraan sehingga akan menjadikan Koperasi lebih mandiri dan makin berakar dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi UMKM Kota Pekanbaru, Yaitu: Sesuai dengan Peraturan daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2013 tentang pembentukan susunan organisasi, kedudukan, dan Tugas Pokok lembaga teknis daerah di lingkungan pemerintah Kota Pekanbaru antara lain: "Melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah Kota Pekanbaru di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah".

Sesuai Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 23 Tahun 2017 Dinas Koperasi UMKM Kota Pekanbaru Tugas dari Koperasi adalah sebagai berikut:

- a) Penyusunan rencana dan program kerja bidang;
- b) Penyusunan petunjuk operasional pembinaan kelembagaan Koperasi dan UMKM;
- c) Melakukan proses pembentukan, perubahan, penggabungan dan pembubaran badan hukum Koperasi;
- d) Melakukan penilaian bidang kelembagaan Koperasi dan UMKM;
- e) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Koperasi dan UMKM;
- f) Pelaksanaan sistem pengendalian intern;
- g) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. (Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru)

Pembinaan Koperasi dibina oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota

Pekanbaru, yang dibina oleh Dinas Koperasi ialah pembinaan permodalan, unit usaha Koperasi, sumber daya manusia, dan cara pembuatan laporan Rapat Anggota Tahunan. Koperasi yang dibina oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru Koperasi yang ada saat ini juga diharapkan dapat lebih fokus pada pelaku usaha. Seperti melakukan pembinaan bagaimana cara mengemas produk agar lebih menarik, bagaimana cara memasarkan produk agar dapat lebih menarik pelanggan dan tentunya bagaimana untuk terus meningkatkan kualitas produk.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "Pembinaan Koperasi di Kota Pekanbaru".

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pembinaan Koperasi oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru?
2. Kendala-kendala apa yang ditemui dalam pelaksanaan pembinaan Koperasi oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru?

Konsep Teori

Pembinaan menurut Sarwono (2001:35) adalah suatu kegiatan yang berupaya untuk menjadikan seseorang dengan perilaku tidak baik menjadi baik, dengan pendekatan secara personal sehingga dapat sekaligus diketahui penyebab perilaku yang tidak baik selama ini ditunjukkan. Pembinaan yang terlaksana mempunyai 2 tujuan yaitu tujuan secara umum dan tujuan secara khusus. Secara umum pembinaan narapidana bertujuan agar mereka menjadi manusia seutuhnya. Sedangkan pembinaan secara khusus ditujukan selama masa pembinaan dan sesudah selesai menjalankan pidana hendaknya dapat bersikap optimis akan masa depannya, mampu untuk hidup mandiri serta berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan nasional, karena pembinaan pada intinya merupakan suatu perangkat

system yang harus dijalankan secara fungsional untuk menjamin bertahannya system tersebut sehingga mencapai tujuan yang diharapkan.

Chaniago dalam Akbar (2009:31) berpendapat, bina berarti mendirikan, membangun, mengusahakan agar mempunyai kemajuan lebih, dari kata bina ini kemudian terbentuk pembinaan yang diartikan sebagai suatu usaha yang dilakukan manusia untuk membangun keadaannya baik bagi dirinya sendiri maupun terhadap orang lain, usaha-usaha tersebut tentunya mengarah pada hal-hal yang bersifat kearah yang lebih baik. Pembinaan terjadi melalui proses melepaskan hal-hal yang bersifat menghambat, dan mempelajari pengetahuan dengan kecakapan baru yang dapat meningkatkan taraf hidup dan kerja yang lebih baik. Pembinaan tersebut menyangkut kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pembiayaan, koordinasi, pelaksanaan, dan pengawasan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan dengan hasil yang maksimal.

Foster dan Karen (2001:11) mengungkapkan bahwa pembinaan lebih tepat ditujukan untuk sisi perilaku manajemen manusia. Pembinaan berarti kegiatan yang terus menerus memberi arahan dan dukungan. Pembinaan merupakan proses berkelanjutan yang merupakan suatu cara untuk mendukung pembekajaran dan pengembangan berkelanjutan. Budiharjo (2002:19) mengatakan bahwa tindakan pembinaan yang merupakan kegiatan mengarahkan dan menyalarkan yang dilakukan oleh pemerintah.

Sudjana dalam Septiyani (2013:17) berpendapat bahwa pembinaan secara luas dapat diartikan sebagai rangkaian upaya pengendalian secara professional terhadap semua unsur organisasi agar unsur-unsur tersebut dapat berfungsi sebagaimana mestinya sehingga rencana untuk mencapai tujuan dapat terlaksana secara berdaya guna dan berhasil guna. Unsur-unsur organisasi itu mencakup peraturan, kebijakan, tenaga

penyelenggara, staf dan pelaksana, bahan dan alat, dan biaya. Dengan perkataan lain, pembinaan mempunyai arah untuk mendayagunakan semua sumber sesuai dengan rencana dalam rangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa menjelaskan pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervise, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Desa.

Pembinaan berarti pembaharuan atau usaha, tindakan atau kegiatan yang dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik. (Gauzali Syadam, 2000)

Pembinaan juga menjadi salah satu strategi agar dapat mencapai target atau sasaran yang diinginkan. Semua strategi yang diterapkan kepada semua sumber daya manusia akan luntur apabila tidak dilakukan pembinaan secara terus menerus. Tentu saja pengertian terus menerus bukan berarti pembinaan itu dilakukan terus dilakukan terhadap sasaran yang sama dan dengan materi yang sama, yang bisa menimbulkan kejenuhan justru dan justru menjadi kurang produktif. Pembinaan dapat dilakukan kepada anggota, pengurus maupun pengelola, baik berkaitan pengetahuan, keterampilan maupun perilaku. Pembinaan dapat dilakukan oleh berbagai sumber seperti: pemerintah, pihak luar, dan manajemen. (Djoko Mulyono, 2012)

Pembinaan adalah suatu proses belajar dengan melepaskan hal-hal yang sudah dimiliki dan dipelajari hal-hal baru yang belum dimiliki, dengan tujuan membantu sasaran dalam menjalaninya, untuk memperbaiki dan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang telah dimiliki atau yang telah ada sebelumnya untuk mencapai hasil kerja dan kehidupan,

yang telah dijalaninya menjadi jauh lebih baik, lebih efektif, dan lebih efisien.

Menurut Miftah Thoha (2002) Pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil dan pernyataan menjadi lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, evolusi atas berbagai kemungkinan, berkembang atau peningkatan atas sesuatu.

Ada dua unsur dari pengertian yakni pertama pembinaan itu bisa suatu tindakan, proses atau pernyataan tujuan dan kedua pembinaan kepada perbaikan atas sesuatu. Pembinaan organisasi bukan hanya organisasinya akan tetapi juga termasuk orangnya (sikap, persepsi, dan motivasinya).

Kalau pengertian pembinaan di atas ditemukan dengan organisasi, maka tidaklah seluruh tindakan, proses, hasil dan pernyataan menjadi lebih baiknya suatu organisasi itu merupakan usaha pembinaan organisasi. Karena kita tidak bisa membedakan usaha-usaha pembinaan organisasi dengan usaha-usaha pembinaan lainnya. Atau dengan kata lain, pembinaan organisasi tidak mempunyai kekhususan di dalam usaha pembinaan atau pengembangan organisasi. Maka perlu diketahui apakah kekhususan yang mampu membedakan antara pembinaan organisasi dengan usaha-usaha perbaikan, pembinaan, dan atau pengembangan organisasi lainnya.

Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha menggambarkan dan menjelaskan bagaimana pelaksanaan Pembinaan Koperasi di Kota Pekanbaru.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru.

3. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas Koperasi UMKM Kota Pekanbaru
- b. Kepala Bidang Koperasi
- c. Kepala Sub bagian Kepegawaian, Umum, dan Perlengkapan.
- d. Pengurus Koperasi.

4. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara yang berkaitan tentang Pembinaan Koperasi di Kota Pekanbaru. Sedangkan data sekunder terdiri dari Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 23 Tahun 2017 Dinas Koperasi UMKM Kota Pekanbaru dan data lain yang mendukung penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

peneliti melakukan tanya jawab secara langsung *key informan*, seputar informasi yang diperlukan dalam penelitian ini. Dalam wawancara peneliti meminta informasi kepada *Key Informan* yang dianggap mengerti tentang permasalahan yang diteliti yaitu Seksi Pendataan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru.

b. Dokumentasi

Dalam penelitian ini dokumentasi berupa foto-foto, berita dari media massa, dan peraturan-peraturan yang berlaku serta data pendukung lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

6. Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisa deskriptif kualitatif yaitu analisa data yang memberikan gambaran yang jelas dan terperinci berdasarkan kenyataan yang

ditemukan dilapangan melalui hasil wawancara yang kemudian ditarik suatu kesimpulan. Pengkajian secara deskriptif yaitu kata lain penjabaran dilakukan menggambarkan atau menjelaskan masalah yang ada atau berusaha menggambarkan secara terperinci berdasarkan kenyataan dilapangan serta memberikan jawaban atas permasalahan yang dikemukakan untuk mendapatkan solusi dalam perbaikan masalah Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru dalam pembinaan Koperasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Di dalam bab ini penulis akan menyajikan data-data yang diperoleh dari peneliti selama masa penelitian, data tersebut akan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dengan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru, Sub Bagian Umum, Bidang Kelembagaan, dan beberapa Kantor-kantor Koperasi yang ada di Kota Pekanbaru. Berdasarkan hasil penelitian ini telah terkumpul sejumlah data yang diperlukan mengenai Pembinaan Koperasi oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru.

Pembinaan juga menjadi salah satu strategi agar dapat mencapai target atau sasaran yang diinginkan. Semua strategi yang diterapkan kepada semua sumber daya manusia akan luntur apabila tidak dilakukan pembinaan secara terus menerus. Tentu saja pengertian terus menerus bukan berarti pembinaan itu dilakukan terus dilakukan terhadap sasaran yang sama dan dengan materi yang sama, yang bisa menimbulkan kejenuhan justru dan justru menjadi kurang produktif. Pembinaan dapat dilakukan kepada anggota, pengurus maupun pengelola, baik berkaitan pengetahuan, keterampilan maupun perilaku. Pembinaan dapat dilakukan oleh berbagai sumber seperti: pemerintah, pihak luar, dan manajemen. (Djoko Mulyono, 2012)

Pembinaan adalah suatu proses belajar dengan melepaskan hal-hal yang sudah dimiliki dan dipelajari hal-hal baru yang belum dimiliki, dengan tujuan membantu sasaran dalam menjalaninya, untuk memperbaiki dan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang telah dimiliki atau yang telah ada sebelumnya untuk mencapai hasil kerja dan kehidupan, yang telah dijalaninya menjadi jauh lebih baik, lebih efektif, dan lebih efisien.

Pembinaan Koperasi yang dilakukan oleh bidang-bidang yang ada pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru adalah Bidang Koperasi karena pada Bidang Koperasi melakukan pembinaan Koperasi mulai dari pendirian Koperasi (kelembagaan Koperasi), sampai dengan Koperasi yang menjalankan usahanya juga melakukan monitoring dan pengawasan terhadap aktivitas Koperasi sehingga Koperasi berjalan sesuai dengan nilai dan prinsip-prinsip Koperasi.

Koperasi yang dibina oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru ialah Koperasi yang berbadan hukum di Kota Pekanbaru dan sebagai pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Dengan cara pembinaan yang diberikan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru antara lain yaitu: memberikan bimbingan teknis dan pelatihan, membuka akses permodalan, promosi kepada Koperasi dan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Pelaksanaan Pembinaan Koperasi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi UMKM Kota Pekanbaru, yaitu:

1. Pembinaan Manajemen
 - a. Pembinaan Permodalan

Modal merupakan hal yang sangat penting diperhatikan karena modal merupakan sarana untuk melaksanakan usaha koperasi. Dalam Koperasi modal terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Perkuatan permodalan atau modal merupakan faktor penting dalam menjalankan usaha Koperasi. Berbagai bentuk program permodalan yang telah dijalankan pemerintah. Perkuatan

permodalan Koperasi Dinas Koperasi UMKM Kota Pekanbaru dijabarkan melalui kegiatan, yakni melaksanakan kegiatan sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan bagi Koperasi, outputnya Koperasi memperoleh informasi mengenai pihak-pihak yang dapat menyalurkan permodalan bagi Koperasi.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mempermudah akses agar mampu mengembangkan usahanya melalui fasilitasi perkuatan permodalan dan untuk memperlancar dan memperluas akses kepada sumber daya produktif kepada lembaga perbankan, non perbankan, program dana bergulir, yang bersumber dari APBD dan APBN termasuk mendorong peningkatan fungsi intermediasi lembaga-lembaga keuangan bagi Koperasi. Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru dari tahun 2006 sampai saat ini tidak lagi memfasilitasi permodalan bagi Koperasi seperti program dana bergulir melalui dana APBD Kota Pekanbaru.

Hal tersebut diungkapkan oleh Seksi Pendataan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru sebagai berikut:

“Tugas kami itu mengarahkan Koperasi agar Koperasi bisa terus tumbuh dan berkembang, dan sehat dan kami mencoba membina dari berbagai sisi melalui tridarma perkoperasian, yang namanya permodalan kita hanya memfasilitasi, jika ada Koperasi dan UMKM yang butuh modal mereka harus mengajukan proposal untuk kita, nanti kita arahkan kemana ini proposal harus dimasukkan, kan ada yang namanya TSN, BUMN, atau kepedulian perusahaan kepada lingkungan sekitarnya, itu kita arahkan kesana untuk mengajukan proposalnya, nah itu fungsi kita bukan kita yang memberikan bantuan modal, kita cuman memfasilitasi dan menjadi mediator”. **(Bapak Ali Imron, Seksi Pendataan Dinas Koperasi**

dan UMKM Kota Pekanbaru, 14 Maret 2018).

Dari hasil wawancara tersebut, Dinas Koperasi memang tidak ada memberikan dana sedikitpun, walaupun Koperasi sangat membutuhkan dana untuk membangun agar Koperasinya tetap aktif dan tumbuh berkembang seperti yang diinginkan. Namun akan tetapi, Dinas Koperasi tetap membantu Koperasi-koperasi agar bisa mendapatkan dana yaitu dengan cara mengajukan proposal kepada perusahaan-perusahaan yang ada.

Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru hanya memberi bimbingan bagaimana cara mendapatkan modal yaitu dengan mengajukan proposal ke Dinas Koperasi dan mengarahkan kemana harus dibawa proposal tersebut. Dinas Koperasi mengundang Koperasi-koperasi yang ada di Kota Pekanbaru dan dilatih. Itu dilatih ada satu hari, tiga hari, lima hari dan seminggu itu menginap lagi itu Dinas Koperasi.

b. Unit Koperasi

Melalui struktur organisasi Koperasi yang profesional, Koperasi memberikan makna ekonomi kepada anggotanya. Proses pemaknaan kaidah ekonomi bagi Koperasi ini sejalan dengan pengembangan unit usahanya yang otonom dan mandiri. Setelah hasil usaha berupa keuntungan tersebut didapatkan, makna-makna ekonomi sebagai pengejawantahan demokrasi ekonomi bagi anggota didapatkan dengan meningkatkannya kesejahteraan anggota melalui pembagian sisa hasil usaha (SHU) yang memadai sebagai pemilik (owner).

Koperasi adalah badan usaha (UU No.17 tahun 2012). Sebagai badan usaha, Koperasi tetap tunduk terhadap kaidah-kaidah perusahaan dan prinsip-prinsip ekonomi yang berlaku. Dengan mengacu pada konsepsi system yang bekerja pada suatu badan usaha, maka koperasi sebagai badan usaha juga berarti merupakan kombinasi dari manusia, aset-aset fisik dan non fisik, informasi, dan teknologi.

c. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan subjek yang aktif dan menentukan bukan objek yang pasif sebagaimana sumber daya lainnya. SDM yang ada dalam Koperasi adalah pengurus, pengawas, anggota, dan pengelola (manajer/karyawan) Koperasi. Tujuan pembinaan SDM tersebut untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam pengelolaan Koperasi dan masing-masing dapat melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya, karena Koperasi mempunyai dua peran yang harus dijalankan, yakni peran utama mensejahterakan anggota dan selanjutnya memperoleh keuntungan, berbeda dengan badan usaha lainnya yang hanya mencari keuntungan saja.

Pembinaan sumber daya manusia bagi Koperasi yang dilakukan Dinas Koperasi UMKM Kota Pekanbaru sudah berjalan, namun masih diperlukan ditingkatkan dari segi kualitas narasumber dan kuantitas peserta pelatihan, khusus pelatihan bersifat teknis seperti pelatihan akuntansi Koperasi ditambah jumlah hari pelatihan, menambah materi-materi pelatihan yang dibutuhkan. Seperti pelatihan perpajakan bagi Koperasi, pelatihan penggunaan teknologi tepat guna, pelatihan manajemen koperasi (manajemen pemasaran, manajemen keanggotaan dan manajemen keuangan) dan intensitas pelaksanaan pelatihan tersebut lebih ditingkatkan lagi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dengan mengembangkan kemampuan teknis, jiwa kewirausahaan dan manajerial sumber daya bagi pengurus dan pengelola, meningkatkan pengetahuan pengawas dalam melaksanakan tugasnya karena pengawas merupakan perpanjangan tangan dari anggota. Bagi anggota peran aktifnya sangat penting karena dalam Koperasi anggota merupakan pemilik sekaligus pengguna jasa Koperasi. Adapun peran serta aktif anggota seperti ikut dalam kegiatan usaha Koperasi, menghadiri kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan

oleh Koperasi, menghadiri pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT), dan ikut terlibat dalam merumuskan kebijakan untuk pengembangan Koperasi.

2. Proses Pembinaan Koperasi

a. Pemeringkatan Koperasi

Pemeringkatan Koperasi adalah suatu kegiatan penilaian terhadap kondisi dan atau kinerja melalui sistem pengukuran yang obyektif dan transparan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang dapat menggambarkan tingkat kualitas dari suatu Koperasi. Pemeringkatan Koperasi sangat penting dilaksanakan bagi seluruh Koperasi setiap tahunnya, untuk melihat sejauhmana kinerja suatu koperasi dan sebagai pedoman dalam melaksanakan pembinaan selanjutnya.

b. Penyediaan Sarana Klinik Konsultasi Bisnis (KKB)

Dalam meningkatkan pelayanan kepada Koperasi dari tahun 2012 Dinas Koperasi UMKM Kota Pekanbaru melaksanakan program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah yang dijabarkan dalam kegiatan fasilitasi pengembangan inkubator teknologi dan bisnis, yakni membuka layanan khusus jasa konsultasi bisnis secara gratis dan profesional bagi masyarakat dunia usaha skala kecil dan Koperasi. Layanan itu diberikan untuk memperkuat tumbuhnya dunia Koperasi dan UMKM. Layanan ini diberikan nama Klinik Konsultasi Bisnis (KKB) sebagai sarana konsultasi untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dalam dunia UMKM dan Koperasi secara cepat dan tepat.

Kehadiran Klinik Konsultasi Bisnis yang bertempat di Dinas Koperasi UMKM Kota Pekanbaru diharapkan Koperasi dapat memanfaatkan fasilitas tersebut untuk berkonsultasi mengenai perkoperasian. Namun dalam pelaksanaannya belum sesuai dengan harapan. Ada beberapa faktor yang memengaruhinya diantaranya kurang tersedianya waktu bagi pengurus, pengawas, dan pengelola Koperasi untuk datang ke Klinik Konsultasi Bisnis. Fasilitas untuk memberikan

konsultasi kepada Koperasi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi UMKM Kota Pekanbaru, yakni KKB masih diperlukan oleh gerakan Koperasi namun pelaksanaannya belum optimal karena belum tersosialisasikannya keberadaan Klinik Konsultasi Bisnis tersebut sehingga gerakan Koperasi belum mengerti tujuan dan manfaat Klinik Konsultasi Bisnis tersebut.

Hal tersebut diungkapkan oleh Seksi Pendataan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru sebagai berikut:

“Kami Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru menyediakan sarana Klinik Konsultasi Bisnis (KKB) yang bertempat di Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru dan diharapkan kepada Koperasi-koperasi yang ada di Pekanbaru ini dapat memanfaatkan fasilitas tersebut untuk berkonsultasi mengenai perkoperasian. Layanan itu diberikan untuk memperkuat tumbuhnya dunia Koperasi dan UMKM. Layanan ini diberikan nama Klinik Konsultasi Bisnis (KKB) sebagai sarana konsultasi untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dalam dunia UMKM dan Koperasi secara cepat dan tepat. **(Bapak Ali Imron, Seksi Pendataan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru, 14 Maret 2018).**

Dari wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru ternyata menyediakan sarana Klinik Konsultasi Bisnis (KKB) yang dapat di datangi oleh Koperasi-koperasi apabila terdapat masalah dalam mengurus Koperasi. Akan tetapi adanya sarana Klinik Konsultasi Bisnis (KKB) ini tidak dimanfaatkan oleh para pengurus Koperasi sehingga masih ada pengurus Koperasi yang tidak mengetahui bagaimana caranya agar Koperasi itu berjalan sesuai dengan Undang-Undang.

3. Realisasi Pembinaan Koperasi

a. Rapat Anggota Tahunan (RAT)

Rapat Tahunan Anggota (RAT), yang merupakan pertemuan anggota yang diselenggarakan setiap akhir tahun keuangan. Dimiliki oleh Manajemen dan Dewan Pengawas yang dihadiri oleh anggota. Rapat Anggota Tahunan disahkan Dewan dan akuntabilitas laporan kantor Pembina, distribusi Bisnis (SHU), pemilihan anggota Dewan dan Dewan Pengawas.

RAT atau singkatan dari Rapat Anggota Tahunan merupakan agenda wajib setiap badan usaha Koperasi, karena di dalamnya akan dibahas tentang pertanggung jawaban pengurus Koperasi selama satu tahun kepada anggota Koperasi yang bersangkutan. Semakin banyak anggota yang terlibat maka akan semakin baik dan dapat menghasilkan keputusan sesuai dengan kebutuhan anggota Koperasi.

Adapun beberapa bahasan utama dalam RAT, di antara lainnya adalah :

- Laporan keuangan tahun anggaran sebelumnya (masih berkaitan dengan laporan keuangan).
- Rencana bisnis kedepan (forecasting dan business plan).
- Voting pengurus baru.

Hal tersebut diungkapkan oleh Seksi Pendataan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru sebagai berikut:

“Fenomena pada dasarnya Koperasi itu adalah tidak menjalankan sesuai dengan prinsip-prinsip Koperasi, mereka tidak mau melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT), dalam aturan Undang-undang di dalam Koperasi tidak boleh mengangkat pengurus atau pengawas itu ada pertalian darah. Mereka bandel tidak mau melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT), kemudian menjalankan Koperasi tidak sesuai dengan Undang-undang, Koperasi itu terkadang tidak mengerti membuat laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan itu fenomena yang paling

banyak ditemukan di dalam Koperasi”. (Bapak Ali Imron, Seksi Pendataan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru, 14 Maret 2018).

Dari hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru sudah melaksanakan pelatihan namun kendalanya masih seperti itu mereka masih tetap tidak bisa menyusun laporan keuangan dan masih banyak Koperasi yang membandel tidak mau mengikuti aturan. Makanya masih banyak Koperasi-koperasi yang tidak tahu bagaimana cara membuat laporan keuangan dan tidak menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan (RAT).

b. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi UMKM Kota Pekanbaru bertujuan untuk monitoring kepada Koperasi yang tidak aktif dan kepada Koperasi yang tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dengan cara turun ke lapangan, memonitor penyebab Koperasi yang tidak aktif dan tidak melaksanakan RAT sehingga dapat mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh Koperasi sehingga kedepannya dapat diberikan solusi dan perbaikan. Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan sudah dilakukan oleh Dinas Koperasi UMKM Kota Pekanbaru namun belum optimal karena kegiatan tersebut belum terlaksana bagi seluruh Koperasi yang ada, kegiatan ini sangat perlu dilaksanakan agar perkembangan Koperasi di Kota Pekanbaru dapat dipantau seluruhnya. Selain dari pada itu perlu diperhatikan tindak lanjut dari kegiatan tersebut agar benar-benar bermanfaat dan bukan sekedar melaksanakan kegiatan/proyek, karena permasalahan Koperasi sangat kompleks dan berbeda-beda untuk setiap Koperasi sehingga diperlukan tindakan seperti pembinaan secara terpadu, terus-menerus dan berkesinambungan.

Dengan adanya pembinaan Koperasi bertujuan agar Koperasi dapat menjadi lembaga yang kuat, sehat, tangguh dan mandiri, dan berjalan sesuai dengan nilai dan prinsip-prinsip Koperasi, anggotanya dapat berperan secara berhasil guna, sedangkan pengawas dan pengurus berfungsi efektif. Pelaksanaan pembinaannya akan diusahakan secara lebih terpadu, berkesinambungan dan lebih ditekankan pada aspek kualitasnya. Agar terwujudnya program pengembangan pemberdayaan Koperasi sehingga mampu sebagai pelaku ekonomi kerakyatan yang berperan meningkatkan taraf kehidupan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya yang akan meningkatkan pembangunan dari segi perekonomian.

Pemerintah perlu memberikan pembinaan terhadap Koperasi karena Koperasi sebagai pelaku ekonomi di Kota Pekanbaru, namun seiring perkembangan serta keberhasilan Koperasi dapat dipastikan bahwa tidak semua Koperasi dapat tumbuh dan berkembang bahkan sebaliknya ada yang berdiri sesaat lalu kemudian gulung tikar.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembinaan Koperasi di Kota Pekanbaru

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pembinaan Koperasi di Kota Pekanbaru sebagai berikut:

1. Sarana dan Prasarana

Dalam melakukan pembinaan kepada Koperasi kendala yang dihadapi Dinas Koperasi diantaranya adalah sarana dan prasarana yang kurang memadai. Dengan sarana yang cukup dan kualitas yang lebih baik dalam melakukan pembinaan maka tujuan yang diharapkan akan dicapai. Sarana dan prasarana adalah faktor penunjang dalam melakukan kegiatan pembinaan Koperasi. Untuk melakukan pembinaan terhadap 1.038 Koperasi diperlukan sarana dan prasarana seperti jumlah kendaraan operasional untuk ke lapangan karena koperasi yang ada di

Kota Pekanbaru tersebar di 12 kecamatan dan 58 kelurahan. Dan dalam melakukan pembinaan Koperasi juga diperlukan dana yang memadai agar pembinaan dapat dilakukan secara efektif, intensif, dan berkesinambungan.

2. Dana untuk Program Pembinaan Koperasi

Dalam melakukan pembinaan Koperasi yang berjumlah 1.038 sangat diperlukan dana yang memadai agar tujuan pembinaan dapat tercapai dengan efektif dan pembinaan dapat dilakukan secara intensif, dan berkesinambungan. Pembinaan yang optimal bagi Koperasi sangat membutuhkan dana yang memadai agar pembinaan tercapai sehingga Koperasi benar-benar berjalan sesuai dengan nilai dan prinsip-prinsip Koperasi.

3. Data Koperasi

Dalam melakukan pembinaan Koperasi data Koperasi sangat diperlukan sebagai pedoman dalam melaksanakan pembinaan karena pembinaan Koperasi berbeda mulai dari jenis Koperasi dan karakteristik keanggotaan. Pembinaan harus dilaksanakan agar Koperasi tumbuh dikalangan masyarakat dan tetap eksis.

Pembinaan yang harus dilaksanakan secara intensif adalah Koperasi yang tumbuh di kalangan masyarakat karena anggotanya terdiri dari masyarakat yang berbagai macam karakter baik dari latar belakang pendidikan, jenis usaha dan mentalitas anggotanya yang berbeda. Adapun data yang diperlukan sebagai dasar melakukan pembinaan diantaranya data mengenai nama Koperasi, jenis usaha Koperasi, alamat Koperasi, pengurus dan pengawas, anggota, permodalan, laporan keuangan, laporan RAT Koperasi yang terdiri dari laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas untuk periode (Januari s/d Desember), rencana kerja dan rencana pendapatan dan belanja Koperasi tahun berikutnya laporan keuangan Koperasi, informasi mengenai kendala dalam melakukan kegiatan Koperasi.

4. SDM Aparatur Pembina Koperasi

Dalam melaksanakan pembinaan Koperasi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru yang mempunyai tugas memberikan bimbingan dan pendampingan kepada Koperasi yang ada di wilayah Kecamatan sudah ditetapkan. Namun masih terbatasnya SDM Aparatur Pembina Koperasi sehingga masih banyak Koperasi yang tidak melaksanakan RAT, begitu pula dengan jumlah Koperasi yang tidak aktif. Melihat permasalahan yang dihadapi Koperasi sangat kompleks, maka sangat diperlukan sumber daya manusia/pembina baik dari segi kuantitas maupun dari kualitasnya (kompetensi) yang memadai.

5. Permodalan Koperasi

Permodalan merupakan faktor utama yang diperlukan untuk mengembangkan suatu unit usaha. Kurangnya permodalan, oleh karena itu pada umumnya Koperasi merupakan Badan Usaha Milik Bersama yang sifatnya transfaran, yang mengandalkan pemupukan modal dari anggota atau lembaga keuangan lainnya. Modal dari anggota dapat dihimpun melalui simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela ataupun jenis simpanan lainnya.

Pengembangan Koperasi memang harus didukung dengan permodalan, karena permodalan merupakan salah satu yang sangat penting untuk menjalankan kegiatan untuk mencapai tujuan Koperasi. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan peranan Pemerintah Kota Pekanbaru khususnya Dinas-dinas yang terkait membantu dari segi permodalan baik itu modal investasi maupun modal kerja untuk mendorong pelaku Koperasi dalam mengembangkan usahanya.

6. Sumber Daya Manusia (SDM)

Koperasi Koperasi merupakan Badan Usaha yang harus mampu bersaing dengan Badan Usaha lainnya, untuk itu sangat diperlukan sumber daya manusia yang profesional. Namun mayoritas Koperasi di Pekanbaru masih tumbuh dan dikelola secara tradisional. Keterbatasan sumber daya manusia di dalam Koperasi baik dari segi pengetahuan dan

keterampilan sangat mempengaruhi dalam menjalankan manajemen Koperasi sehingga usaha yang dijalankan Koperasi sulit untuk berkembang.

7. Manajemen Koperasi

Manajemen dimaknai sebagai aktivitas seseorang dalam mengatur, membimbing, dan memimpin semua orang yang menjadi pembantunya agar usaha yang sedang digarap dapat mencapai tujuan. Manajemen Koperasi adalah berbagai aktivitas yang dilakukan oleh pengurus/pengelola (menejer). Koperasi dalam merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, dan melakukan pengawasan terhadap semua orang yang menjadi pembantunya agar usaha Koperasi yang sedang digarap dapat mencapai tujuan.

a. Manajemen Pemasaran

Pasar dalam arti sempit merupakan tempat pertemuan dan penawaran barang dan jasa bertemu. Konsep ini sangat cocok untuk pengertian pasar tradisional. Pasar dalam arti luas dipandang sebagai proses transaksi antara permintaan dan penawaran akan barang dan jasa. Konsep terakhir ini sangat cocok dengan konsep pasar modern. Dalam lingkungan pasar yang bersaing, Koperasi adalah salah satu organisasi yang ikut serta bersaing memperebutkan pelanggan, baik pelanggan internal (anggota) maupun pelanggan eksternal (non anggota). Keberlangsungan Koperasi hanya akan terus dirasakan jika Koperasi memiliki keunggulan bersaing dan para anggota mampu mempertahankan keunggulan bersaing dan para anggota mampu mempertahankan keunggulan bersaing itu dengan jalan berpartisipasi aktif pada Koperasinya.

b. Manajemen Partisipasi Keanggotaan

Secara hukum, seseorang memiliki kebebasan untuk masuk atau keluar dari keanggotaan Koperasi. Seseorang akan menjadi anggota atau tetap menjadi anggota dalam sebuah Koperasi bila mereka merasa ada manfaat yang diperoleh dari Koperasi lebih besar dibandingkan dari organisasi lain yang menjadi persaingan Koperasi. Oleh karena itu, Koperasi harus dapat

menghasilkan paling sedikit kelebihan yang sama dengan perusahaan non Koperasi dan anggota harus mempertahankan keunggulan tersebut dengan cara berpartisipasi aktif terhadap Koperasinya.

Manajemen keanggotaan Koperasi merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dari pengadaan, pengembangan, pemberian manfaat, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan keanggotaan dengan maksud mencapai system tujuan (goal system) organisasi Koperasi yang telah ditetapkan bersama.

Guna mendapatkan anggota yang berkualitas, manajemen Koperasi perlu mengadakan analisis usaha Koperasi sekaligus usaha anggota agar dapat diketahui dan ditentukan usaha Koperasi apa yang harus dilakukan untuk melayani kepentingan para anggota.

c. Manajemen Keuangan Koperasi

Manajemen keuangan Koperasi berkaitan dengan aktivitas pengumpulan dana dan penggunaan dana tersebut secara efektif dan efisien. Dalam kaitannya dengan aktivitas tersebut, ada perbedaan yang mendasar dalam pengelolaan keuangan perusahaan Koperasi dengan perusahaan nonkoperasi. Perbedaan tersebut terjadi karena adanya perbedaan tujuan antara Koperasi dan nonkoperasi serta perbedaan peran keanggotaan dalam perusahaan. Pada Koperasi, tujuan utama didirikannya perusahaan Koperasi adalah membantu meningkatkan kesejahteraan anggota, bukan memaksimalkan keuntungan perusahaan Koperasi. Sifat tujuan Koperasi seperti itu dimaksudkan cara memperoleh dana, menggunakan dana dan pengukuran kinerja keuangan dilakukan secara berbeda dengan perusahaan nonkoperasi yang bertujuan memaksimalkan keuntungan.

Kesimpulan

Pelaksanaan Pembinaan Koperasi oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil

dan Menengah Kota Pekanbaru sudah dilaksanakan namun belum optimal. Ini terlihat dari masih banyaknya Koperasi yang Tidak Aktif, tidak aktifnya suatu Koperasi dikarenakan Koperasi tersebut masih banyak yang tidak mengetahui bagaimana cara membuat laporan keuangan dan menjalankan Koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip perkoperasian.

Koperasi tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT), dikarenakan Koperasi yang menjalankan usaha tidak sesuai dengan nilai dan prinsip-prinsip perkoperasian, rendahnya partisipasi anggota dalam pengelolaan Koperasi, Identitas Koperasi yang tidak diketemukan lagi.

Pelaksanaan pembinaan Koperasi oleh Dinas Koperasi UMKM kota Pekanbaru yaitu pembinaan permodalan, Unit Usaha, Sumber Daya Manusia (SDM) Koperasi, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan, peneringkatan Koperasi, penilaian KSP/USP, tersedianya Klinik Konsultasi Bisnis (KKB).

Kendala-kendala yang dihadapi dalam melakukan pembinaan Koperasi oleh Dinas Koperasi UMKM Kota Pekanbaru dapat dilihat dari dua faktor, yakni faktor internal diantaranya terbatasnya Sarana dan Prasarana, terbatasnya Dana untuk Program Pembinaan Koperasi, Kurang Akuratnya Data, terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) pembina. Sedangkan faktor eksternal adalah Kurangnya Permodalan, SDM yang Kurang Memadai, Kurang baiknya Manajemen, dan Usaha tidak dijalankan secara Profesional.

Saran

Adapun saran-saran peneliti dengan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kepada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru pentingnya semua kebijakan-kebijakan lebih menyentuh kepada masyarakat. Baik dari informasi tentang pelatihan-pelatihan, adanya pameran-pameran dan Terutama dalam hal peningkatan SDM Koperasi yang dinilai masih belum mengenai sasaran.

2. Pentingnya Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru untuk terus meningkatkan Pembinaan terhadap Koperasi yang ada di Pekanbaru sehingga Koperasi-koperasi bisa menjadi soko guru perekonomian Indonesia.
3. Kepada pembaca agar dapat melanjutkan penulisan penelitian tentang Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru baik dari segi peningkatan Koperasi ataupun kebijakan- kebijakan pemerintah dalam membangun dan mengembangkan Koperasi sebagai pondasi ekonomi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Jamaluddin. 2015. Metode Penelitian Administrasi Publik. Yogyakarta : Penerbit Gava Media.
- Budiharjo, Mariam. 2002. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta : PT: Gramedia Pustaka Utama.
- Dwiyanto, Agus. 2002. Penilaian Kinerja Organisasi Pelayanan Publik. Yogyakarta : Departemen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Mada.
- Foster, Bill dan Seeker, Karen. 2001. Pembinaan untuk Meningkatkan Kinerja Karyawan. Jakarta : Ramelin.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2001. Organisasi dan Motivasi Dasar Pendekatan Produktifitas. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Hendar, 2010. Manajemen Perusahaan Koperasi (Pokok-pokok Pikiran Mengenai Manajemen dan Kewirausahaan Koperasi). Penerbit Erlangga, Cetak PT Gelora Aksara Pratama.
- Hendrojogi. 2012. Koperasi : Azas-Azas, Teori, dan Praktik. Jakarta : Rajawali Perss.

- Ketaren, M.S. 2007. Asas Landasan dan Tujuan Koperasi. Jakarta: Rajawali Perss.
- Iskandar, 2010. Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif). Jakarta: GP Press
- Lubis, S.B. Hari dan Martani Huseini. 2009. Teori Organisasi (Suatu Pendekatan Makro). Jakarta: Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
- Mulyadi Dedi & Rivai Veithzal. 2011. Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi. Jakarta: Rajawali Perss.
- Mulyono, Djoko. 2012. Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam. Jakarta : Penerbit CV Andioffset.
- Munker, Hans, H. 2012. 10 Kuliah Mengenai Hukum Koperasi. Jakarta : Penerbit Rekadesa.
- Nawawi, Hadari. 2003. Kepemimpinan Mengefektifkan Organisasi. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Sarwono, Sarlito Wirawan. 2001. Pengantar Psikologi Sosial. Jakarta : Rineka Cipta.
- Schaars, M.A. 2011. Koperasi Perekonomian Indonesia. Jakarta: Rajawali Perss.
- Siagian, S.P. 2007. Organisasi, Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi. Jakarta : CV Haji Mas Agung.
- Subandi. 2010. Ekonomi Koperasi (Teori dan Praktik). Bandung : ALFABETA.
- Sugiyono. 2007. Metode Penelitian Administrasi. Bandung : ALFABETA.
- _____ 2008. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Bandung, CV ALFABETA.
- _____ 2010. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan kuantitatif, kualitatif, R&D. Bandung: ALFABETA.
- Sutarto. 2000. Dasar-Dasar Organisasi. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Syadam, Gauzali. 2000. Manajemen Sumber Daya Manusia (Human Resource) Suatu Pendekatan Mikro. Jakarta : Djanbatan
- Syamsi, Ibnu. (2000). Dasar-Dasar Kebijakan Keuangan Negara. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Thoha, Miftah. 2002. Pembinaan Organisasi. Jakarta: Rajawali Perss.
- Tika, Moh. Pabundu . 2005. Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan. Jakarta: Bumi Aksara.
- Widianti Ninik dan Panji Anongan. 2007. Dinamika Koperasi. Jakarta: Bina Adi Aksara.
- Widianti Ninik dan Sunindhai. 2008. Koperasi dan Perekonomian Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta.
- Skripsi :
- Akbar, Sofyan. 2009. Pembinaan Narapidana Penyalahgunaan Narkoba di Rumah Tahanan Kelas IIB Siak Sri Indrapura. Strata 1 Sosiologi, Universitas Riau.
- Septiyani, Erwin Eka. 2013. Pembinaan Anak Didik Pemasarakatan Melalui Pendidikan Kesetaraan Kejar Paket A, Paket B, dan Paket C di Lembaga Pemasarakatan Anak Keluarga Anak Kutuorjo Tahun 2013. Strata 1 Politik dan Kewarganegaraan. Universitas Negeri Semarang.

Internet:

[Apriyani, Ika. 2012. "Pembinaan dan Pengembangan Koperasi".](#)

<https://aprianiika69.blogspot.com/pembinaan-dan-pengembangan-koperasi/>

[//aprianiika69.blogspot.com/pembinaan-dan-pengembangan-koperasi/](https://aprianiika69.blogspot.com/pembinaan-dan-pengembangan-koperasi/)

[Gema Justisia. 2015. "Pembinaan Pemerintah Terhadap Koperasi".](#)

<https://www.gemajustisia.com/pembinaan-pemerintah-terhadap-koperasi/>

[Hoesin, Haslizen.2017. "Koperasi Organisasi Berwatak sosial".](#)

<https://lizenhs.wordpress.com/category/ber-usaha-yok/>

[Tarymagetan. 2011. "Contoh Koperasi yang Sukses di Indonesia".](#)

<https://tarymagetan.wordpress.com/contoh-koperasi-yang-sukses-di-indonesia/>

Jurnal:

Hidayat, Roli. 2012. Analisis Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kota Pekanbaru (Studi Kasus Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi dalam Pembinaan Koperasi di Pekanbaru). Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu

Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, Pekanbaru.

Ida Susilawaty dan Harapan Tua RFS. 2014. Pelaksanaan Pembinaan Koperasi oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Pekanbaru. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, Pekanbaru.

Nurjannah, Siti. 2012. Efektivitas Pelaksanaan Program Pengembangan Kewirausahaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Pekanbaru. Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, Pekanbaru.

Dokumen:

Undang-Undang Dasar No.17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian.

Uraian Tugas Sesuai Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 23 Tahun 2017 Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru.